

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Basith, 2008, Islam dan Manajemen Koperasi, UIN MALANG PRESS.
- Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Azrul Tanjung, 2017, Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia, Jakarta, Erlangga.
- Balai Pustaka. P.N., Pengetahuan Perkoperasian, (tp.1981)
- Hendar & Kusnadi, 2005, Ekonomi Koperasi, Jakarta, Lembaga Penerbit FEUI.
- Hendradjogi, 2012, Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ima Suwandi, Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial, Loc. Cit.
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia Publishing.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pandji Anoraga dan H. Djoko Sudantoko, 2002, Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Grafindo Media Pratama.
- Solichul HA, Bakri, 2016, Gabungan Koperasi Batik Indonesia, Yogyakarta: GKBI Medari.
- Sudarsono, 2002, Koperasi Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2005, Hukum Koperasi Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

## **Jurnal**

- Hendriani, dkk, 2015, “Pengaruh alat perlengkapan organisasi koperasi (APOK) dan partisipasi anggota terhadap keberhasilan usaha koperasi di kota Pekanbaru”, *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis* Vol. 7, No. 2.
- Herdiana, 2007, “Aspek Hukum Pemeriksaan Koperasi”, *Jurnal Educare* Vol. 4, No. 2.
- Meida Anugrah, 2013, “Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 5.
- Octorial Marpaung, 2015, “Tanggung Jawab Pengurus Pusat Koperasi Terhadap Anggota Dan Pihak Ketiga Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha”, *Publikasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 1, No. 1.
- Oelengan, 2009, “Tanggung Jawab Badan Pengawas dalam Koperasi sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum”, *Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung* Vol. 4, No. 1.
- Pratama, 2015, “Upaya Pengurus Koperasi Untuk Meningkatkan Partisipasi Anggota Di Koperasi Wanita Harum Melati Karang Pilang Surabaya”, *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya* Vol. 3, No. 2.
- Reggy Sesario, 2015, “Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Studi Kasus: Koperasi Citra Karya Guna Persada (KCKGP)”, *Jurnal Hukum Universitas Bina Nusantara Jakarta* Vol. 1, No. 1.
- Suwety, 2017, “Pengaruh implementasi nilai, prinsip dan Kepemimpinan koperasi terhadap kualitas Rapat Anggota Tahunan (survei pada koperasi di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur)”, *Jurnal Coopetition* Vol. 8, No. 2.
- Widiastuti, 2009, “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana”, *Jurnal Wacana Hukum* Vol. 8, No. 2.
- Wisnuwardani, 2018, “Tanggung Jawab Koperasi Simpan Pinjam terhadap Jaminan Milik Pengurus yang di Jaminkan Hutang Koperasi”, *Jurnal Cakrawala Hukum I* Vol. 9, No. 1.

Yunasaf, 2004, “Kepemimpinan Pengurus Koperasi Dalam Mendinamiskan Organisasi Koperasi (Kasus Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari, Sumedang)”, *Jurnal Sosiohumaniora* Vol. 6, No. 3.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Pakai, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha.